



**MIGRANT CARE**  
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

**MAMPU**

Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan



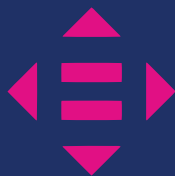
# PANDEMI COVID-19: TANTANGAN NYATA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

(SEBUAH TINJAUAN AWAL)



## PENULIS

HAMONG SANTONO  
SAFINA MAULIDA  
WAHYU SUSILO



# **PANDEMI COVID-19:**

## TANTANGAN NYATA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

(SEBUAH TINJAUAN AWAL)

PENULIS

**Hamong Santono, Safina Maulida, Wahyu Susilo**

PENGOLAH DATA

**Zulyani Evi, Yovi Arista**

DESAIN SAMPUL DAN TATA LETAK

**Derzia Graphic House**

**Cetakan pertama, September 2020**

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Migrant CARE dengan dukungan MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Program MAMPU adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini menjadi tanggung jawab Tim Redaksi dan tidak mewakili pernyataan maupun pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

---

Migrant CARE

©2020

Jl. Jatipadang I No. 5A, Jati Padang, Pasar Minggu,

Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Website: [migrantcare.net](http://migrantcare.net)

E-mail: [secretariat@migrantcare.net](mailto:secretariat@migrantcare.net)



**MAMPU**  
Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan

## DAFTAR ISI

Pesan Utama	1
Pendahuluan	3
Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Sebelum Covid-19 Covid-19 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia	5 9
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	9
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan	13
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	15
Tujuan 5. Kesenjangan Gender	17
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	18
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau	19
Tujuan 8. Kerja Layak dan Pertumbuhan Inklusif	20
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	22
Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan	23
Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	24
Tujuan 12. Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab	25
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	29
Tujuan 14. Ekosistem Lautan	30
Tujuan 15. Ekosistem Darat	30
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	31
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	31
Mengatasi Tantangan	33
Referensi	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dampak Covid terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	3
Gambar 2. Sebaran Pekerja Terdampak Covid-19	10
Gambar 3. Pekerja yang Mengalami PHK	11
Gambar 4. Proporsi Tenaga Kerja Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 5. Persentase Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik	21
Gambar 6. Ekonomi Daring Indonesia 2015 - 2025	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Negara-Negara Asia Tenggara 2020	6
Tabel 2. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Beberapa Negara G-20	7
Tabel 3. Indeks dan Peringkat <i>Spillover</i> Negara Anggota G-20 dan Beberapa Negara Maju Lainnya	8
Tabel 4. Target 3 TPB yang Terkait Langsung dengan Wabah Penyakit	14
Tabel 5. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (Inequality Adjusted Human Development Index/IHDI)	16

## COVID-19: TANTANGAN NYATA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA



### Pesan Utama

- **Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia masih belum menggembirakan.** Indonesia sebenarnya merupakan salah satu negara yang memiliki kesiapan untuk melaksanakan TPB, baik dari sisi makro ekonomi, stabilitas politik hingga tata kelola pelaksanaan. Namun modalitas tersebut belum cukup terlihat berkontribusi terhadap pencapaian TPB. Salah satu penyebab, Tim Koordinasi Nasional TPB yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden (Perpres) No.59/2017 dan bersifat multipihak belum bekerja secara optimal, meluas dan berdampak.
- **Kelompok rentan mendapat pukulan terberat.** Covid-19 menyerang setiap kelompok warga tanpa kecuali, namun dampak diterima oleh masing-masing kelompok warga tidaklah sama. Kelompok warga rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, pekerja upah rendah dan miskin kota mendapatkan pukulan terberat baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Situasi ini mempengaruhi apa yang telah dicapai dan memperbesar tantangan dan rintangan pelaksanaan dan pencapaian TPB di Indonesia.
- **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah mengingatkan pentingnya kesiapan negara menghadapi wabah maupun pandemi.** Tiap Tujuan TPB memiliki target-target *means of implementation* yang harus dicapai untuk mempermudah pencapaian target-target teknis pada tahun 2030. Target implementasi pada Tujuan 3, secara khusus memberi target mengenai pentingnya kesiapan negara dalam menghadapi wabah atau pandemi penyakit (target 3.b, 3.c dan 3.d). Dengan demikian, TPB (terutama Goal 3 dan target-targetnya) seharusnya bisa menjadi alat untuk mendukung penanganan Covid-19, dan pandemic ini tidak bisa menjadi alasan penundaan pencapaian TPB.
- **Pandemi Covid-19 tidak cukup kuat mendorong perubahan perilaku secara signifikan.** Saat awal pandemi terjadi perubahan perilaku warga yang signifikan. Perilaku hidup sehat, pola kerja, pola konsumsi dan sebagainya. Perubahan tersebut bisa menjadi modal awal terwujudnya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang dapat berdampak pada kondisi lingkungan hidup secara keseluruhan. Namun perubahan tersebut

tidak berlangsung lama dan luas, sesaat setelah deklarasi kenormalan baru (berdamai dengan pandemi) sehingga momentum produksi dan konsumsi yang berkelanjutan hilang.

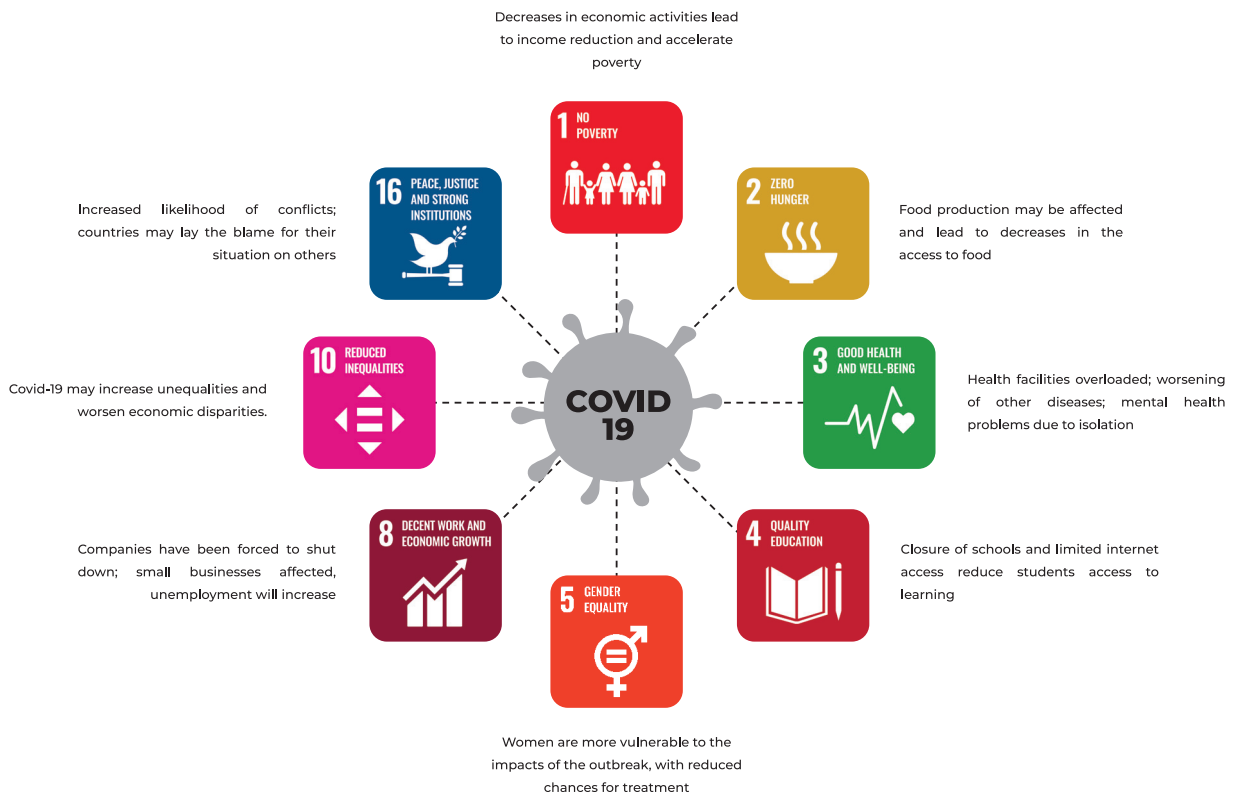
- **Evaluasi dampak Covid-19 dan revisi Peta Jalan TPB serta dokumen teknis lainnya agar tetap relevan.** Penilaian menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa dalam dampak Covid-19 terhadap TPB di Indonesia. Beberapa indikasi telah terlihat seperti meningkatnya jumlah warga miskin, meningkatnya angka rasio gini dan ketimpangan kesempatan serta meningkatnya jumlah pengangguran. Asumsi makro, capaian dan target TPB yang telah disusun perlu dilihat kembali dan direlevankan agar dapat diketahui tujuan dan target apa saja yang dapat dipertahankan pencapaiannya dan mengidentifikasi prioritas-prioritas TPB pasca Covid-19.
- **Memperkuat sistem dan layanan kesehatan masyarakat (*Public Health System*).** Penanganan pandemi Covid-19 dan wabah penyakit lainnya membutuhkan komitmen dan kapasitas kuat dari layanan kesehatan masyarakat. Investasi baik dalam fasilitas fisik kesehatan maupun penguatan institusi dan pengetahuan agar mampu bertindak cepat dan efisien dengan sumber daya yang tersedia sangat dibutuhkan.
- **Memperkuat perlindungan sosial dan akses layanan dasar warga.** Pandemi Covid-19 telah memberi sinyal terkait kelemahan-kelemahan perlindungan sosial yang dimiliki Indonesia, baik dari sisi ragam maupun pelaksanaan program. Perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan universal seperti *Universal Basic Income (UBI)* dan *Universal Child Benefits (UCBs)* kiranya dapat menambah opsi ragam perlindungan sosial yang komprehensif di masa depan. Demikian pula halnya dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan serta air bersih dan sanitasi, yang masih perlu diperbaiki kualitas dan kuantitasnya.
- **Mengantisipasi kerentanan.** Kemampuan mengantisipasi kerentanan warga akibat krisis dapat membantu kesiapan Indonesia menghadapi bencana termasuk wabah penyakit. Belajar dari Covid-19, bukan hanya kelompok rentan yang telah sejak lama teridentifikasi yang terdampak, namun juga terdapat kelompok baru yang berpotensi menjadi kelompok rentan seperti *aspiring middle class*.
- **Mendorong kerjasama internasional untuk menampung limpahan potensi dukungan (*spillover*) TPB.** Posisi Indonesia sebagai negara menengah atas menjadikan opsi sumber pembiayaan pembangunan menjadi terbatas, terlebih di masa pandemi. Menggunakan peluang limpahan potensi dukungan (*spillover*) TPB dapat menjadi tambahan opsi pembiayaan sekaligus memperkuat peran Indonesia untuk membantu negara-negara lain melalui forum G-20 maupun G-77. Upaya ini juga dapat memperkuat implementasi *South-South and Triangular Cooperation (SSTC)* Indonesia.

# PENDAHULUAN



Sejak diadopsi lima tahun lalu, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus mencari metode yang tepat dan komprehensif untuk melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Mereka juga telah memperbaharui komitmennya untuk mempercepat kemajuan TPB saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi TPB pada September 2019. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB meluncurkan Decade of Action<sup>1</sup> dengan maksud agar seluruh pihak meningkatkan daya upayanya dalam melaksanakan TPB. Terutama untuk mengatasi tantangan terbesar TPB, mulai dari kemiskinan dan kesetaraan gender hingga perubahan iklim, ketimpangan serta menutup kesenjangan pembiayaan.

**Gambar 1. Dampak Covid terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**



Sumber: Filho et al, 2020

<sup>1</sup> Decade of Action mendorong seluruh pihak untuk memobilisasi tindakan pada tiga tingkatan yaitu global, lokal dan warga

Namun ketika baru menginjak awal tahun 2020 kecamuk pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan semua skenario global. Semua negara yang terdampak mengambil respon kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Bentuknya berupa *lockdown* dan *partial lockdown*. Langkah ini tentu membuat mobilitas manusia dan kegiatan ekonomi, baik perdagangan, produksi dan distribusi terganggu. Kebijakan pembatasan sosial telah menempatkan pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar masalah kesehatan, namun juga telah menjadi masalah sosial, ekonomi dan politik. Tiap negara memilih untuk berfokus pada penanganan virus dan dampaknya di negaranya masing-masing. Ekonomi global dan banyak negara telah mengalami kontraksi termasuk Indonesia. Pada semester I tahun 2020, sudah ada beberapa negara maju masuk dalam resesi ekonomi.

Laporan Global Kemajuan TPB terbaru menyatakan bahwa sebelum Covid-19, posisi dunia masih belum berada pada jalur yang tepat untuk mencapai TPB.<sup>2</sup> Walaupun telah terlihat ada kemajuan, namun masih belum merata dan bahkan di beberapa bidang membutuhkan perhatian yang lebih serius. Pandemi telah mengganggu banyak pelaksanaan TPB dan membalikkan beberapa kemajuan yang telah diperoleh dalam beberapa dekade. Jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan diprediksi meningkat<sup>3</sup>, sebagai salah satu contoh kemunduran akibat pandemi. Covid-19 juga menyebabkan 270 juta orang penduduk mengalami krisis pangan<sup>4</sup>. Jurang antara kaya dan miskin semakin dalam, 400 juta orang diperkirakan kehilangan pekerjaan sementara 32 perusahaan paling menguntungkan di dunia mendapatkan keuntungan 109 miliar USD lebih dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Menurut catatan UNESCO (2020)<sup>6</sup>, lebih dari 130 negara telah menerapkan penutupan sekolah dan universitas secara nasional, yang mempengaruhi lebih dari 80% populasi siswa dunia. Covid-19 menjadi tantangan nyata bagi upaya pencapaian TPB.

Atas dasar situasi tersebut dokumen ini disusun untuk melihat situasi TPB terkini di masa pandemi Covid-19, Migrant CARE melakukan penilaian awal mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan TPB di Indonesia dan memberikan usulan-usulan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan TPB di Indonesia ke depan. Dokumen ini disusun dalam waktu kurang lebih satu bulan. Sumber dari tinjauan awal ini merujuk pada beberapa hasil kajian yang telah dilakukan, laporan yang disusun lembaga internasional, dokumen resmi Indonesia terkait TPB dan monitoring pemberitaan media massa. *Peer review* juga dilakukan untuk memperkuat substansi laporan.

---

<sup>2</sup> Lihat The Sustainable Development Goals Report 2020 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/>

<sup>3</sup> Andy Sumner dkk mengestimasi kenaikan jumlah orang miskin secara global dalam beberapa skenario kontraksi, mulai dari terendah (5%) hingga tertinggi (20%). Dalam skenario paling ekstrem jumlah orang miskin diperkirakan naik antara 420 hingga 580 juta orang.

<sup>4</sup> Lihat <https://www.wfp.org/news/world-food-programme-assist-largest-number-hungry-people-ever-coronavirus-devastates-poor>

<sup>5</sup> Oxfam (2020). Power, Profits and Pandemic; From corporate extraction for the few to an economics that works for all, Briefing Papers, September. <https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic>

<sup>6</sup> UNESCO. COVID-19 Educational Disruption and Response. <https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures>

## KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA SEBELUM COVID-19



Indonesia telah mengawali pelaksanaan TPB dengan baik dibanding pada saat melaksanakan komitmen Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Keseriusan Indonesia tercermin melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyatakan pelaksanaan TPB dipimpin langsung oleh Presiden. Indonesia juga telah memasukkan Tujuan dan Target TPB ke dalam Rencana Pembangunan Nasional baik jangka panjang maupun menengah.

Lebih spesifik, Indonesia juga membentuk Tim Koordinasi Nasional TPB yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian TPB. Secara teknis, Indonesia juga telah merumuskan Peta Jalan, Rencana Aksi Nasional/Daerah (RAN/D) TPB.<sup>7</sup> Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5%, jumlah penduduk miskin yang terus menurun ditambah dengan menurunnya ketimpangan pendapatan<sup>8</sup>, menjadikan Indonesia semakin optimis untuk memulai pelaksanaan dan mencapai Tujuan dan Target TPB.

Inisiatif-inisiatif tersebut tidak lain bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang masih dihadapi dalam pembangunan di Indonesia sekaligus mendorong pelaksanaan TPB yang inklusif, partisipatif dan tidak meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*). Selain itu juga meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama global dengan menjadikan Indonesia sebagai panutan dan pelopor pelaksanaan dan pencapaian TPB.

Dalam sepertiga awal pelaksanaan TPB, terdapat beberapa kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Berdasar laporan Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Indonesia berada di peringkat 101 dari 166 negara, meningkat dari tahun 2019 yang berada di posisi 102 dari 162 negara. Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat (*on the track*) untuk isu pengurangan kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi, kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta perubahan iklim, meskipun masih menghadapi tantangan-tantangan berarti. Sedangkan kesetaraan gender, kota yang berkelanjutan, kehidupan bawah laut, kehidupan darat dan kerjasama global, Indonesia berada dalam situasi stagnan. Untuk tujuan-tujuan TPB

---

<sup>7</sup> Upaya dan capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama antara Pemerintah dan CSO. Beberapa CSO Indonesia seperti INFID, Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, PSHK, YLBHI, Institut Kapal Perempuan, Aliansi Jurnalis Independen, dan beberapa CSO lainnya, saat itu aktif mendorong adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melaksanakan TPB dan memastikan pelaksanaan TPB yang inklusif dan partisipatif.

<sup>8</sup> Gini ratio Indonesia pada tahun 2016 berada di angka 0,39 yang sebelumnya sebesar 0,41 pada tahun 2015.



lainnya, Indonesia berada dalam situasi cukup meningkat. Penyediaan data sebagai basis pengambilan kebijakan merupakan catatan tersendiri bagi Indonesia, karena dalam laporan tersebut Indonesia memiliki kekosongan data tentang situasi sunat perempuan, perbudakan modern dan perkawinan anak.

Namun, apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, kinerja Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Kamboja dan Laos (Tabel 1). Kemajuan berarti dicapai oleh Vietnam dan Malaysia. Sementara jika dibandingkan dengan negara-negara G-20, posisi Indonesia hanya lebih baik dari India dan Afrika Selatan (Tabel 2). Sebagai catatan, dokumen Sustainable Report 2020 tersebut disusun berdasar data-data sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

**Tabel 1**  
Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Negara-Negara  
Asia Tenggara Tahun 2020

<b>NEGARA</b>	<b>NILAI INDEX</b>	<b>PERINGKAT</b>
Brunei	68,2 (n.a*)	88 (n.a**)
Indonesia	65,3 (64,2*)	101 (102**)
Kamboja	64,4 (61,8*)	106 (112**)
Laos	62,1 (62*)	116 (111**)
Malaysia	71,8 (69,6*)	60 (68**)
Myanmar	64,6 (62,2*)	104 (110**)
Philipina	65,5 (64,9*)	99 (97**)
Singapura	67 (69,6*)	93 (66**)
Thailand	74,5 (73*)	41 (40**)
Timor Leste	n.a	n.a
Vietnam	73,8 (71,1*)	49 (54**)

Sumber: Sustainable Development Report 2019 & 2020 (\*) Nilai Indeks 2019 (\*\*) Peringkat 2019

**Tabel 2**

Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Beberapa Negara G-20

<b>NEGARA</b>	<b>NILAI INDEX</b>	<b>PERINGKAT</b>
Arab Saudi	65,8 (64,8*)	97 (98**)
Afrika Selatan	63,4 (61,5*)	110 (113**)
Amerika Serikat	76,4 (74,5*)	31(35**)
Argentina	73,2 (72,5*)	51 (45**)
Australia	74,9 (73,9*)	37 (38**)
Brazil	72,7 (70,6*)	53 (57**)
China	73,9 (73,2*)	48 (39**)
India	61,9 (61,1*)	117 (115**)
Indonesia	65,3 (64,2*)	101 (102**)
Inggris	79,8 (79,4*)	13 (13**)
Italia	77 (75,8*)	30 (30**)
Jepang	79,2 (78,9*)	17 (15**)
Jerman	80,8 (81,1*)	5 (6**)
Kanada	78,2 (77,9*)	21 (20**)
Meksiko	70,4 (68,5*)	69 (78**)
Perancis	81,1 (81,5*)	4 (4**)
Rusia	71,9 (70,9*)	57
Turki	70,3 (68,5*)	70 (79**)

Sumber: Sustainable Development Report 2019 & 2020 (\*) Nilai Index 2019 (\*\*) Peringkat 2019

Berdasar tabel 1 dan 2 di atas, kinerja TPB Indonesia masih jauh dari harapan. Beberapa faktor bisa menjadi penyebab, salah satunya belum efektifnya tata kelola pelaksanaan TPB di Indonesia dan strategi pencapaian. Tim Koordinasi Nasional TPB belum bekerja sebagaimana mestinya dan belum mampu mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh aktor-aktor non pemerintah utamanya dalam merancang strategi dan pelaksanaan TPB. Meskipun dari dimensi komitmen politik dan payung kebijakan, Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam TPB.<sup>9</sup>

Indonesia masih harus berjuang untuk mewujudkan komitmennya untuk menjadi negara pelopor dan panutan dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19, menjadikan perjuangan tersebut membutuhkan upaya ekstra. Banyak hasil yang telah dicapai diperkirakan akan mengalami kemunduran. Meski demikian, Covid-19 juga memberikan petunjuk untuk mengatasi tantangan dan memperkuat pelaksanaan TPB ke depan.

<sup>9</sup> Dalam sebuah laporan tentang SDGs di Indonesia, UN menyebut bahwa tata kelola untuk mempersiapkan pencapaian di Indonesia bisa menjadi contoh baik. Lihat United Nation Development Group, The Sustainable Development Goals Are Coming To Life, Stories of Countries Implementation and UN Support, New York, 2016. Pengalaman Indonesia dituliskan pada halaman 24-25.

Pada sisi lain, Indonesia memiliki nilai indeks *Spillover* TPB yang tinggi (tabel 3). Indeks *Spillover* mengukur dampak lintas batas yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain, yang pada gilirannya mempengaruhi kapasitas negara terdampak untuk mencapai TPB. *Spillover* ini mencakup aspek ekonomi, perdagangan dan finansial, aspek lingkungan maupun aspek keamanan. Negara-negara maju cenderung memiliki nilai indeks *spillover* yang rendah.

**Tabel 3**

Indeks dan Peringkat *Spillover* Negara Anggota G-20 dan Beberapa Negara Maju Lainnya

<b>NEGARA</b>	<b>NILAI SPILLOVER INDEKS*</b>	<b>PERINGKAT SPILLOVER INDEKS</b>	<b>PERINGKAT TPB</b>
Arab Saudi	73,8	125	97
Afrika Selatan	92	100	110
Amerika Serikat	59,2	151	31
Argentina	94	86	51
Australia	61,6	145	37
Brazil	97,3	60	53
China	94,2	84	48
India	98,8	36	117
Indonesia	97,6	56	101
Inggris	52,1	157	13
Italia	69	132	30
Jepang	66,1	143	17
Jerman	57,0	153	5
Kanada	60,6	147	21
Luksemburg	33,5	164	44
Meksiko	94,9	78	69
Perancis	51,1	158	4
Rusia	78,3	123	57
Singapura	12,4	166	93
Swiss	35,8	163	15
Turki	93,3	94	70

Sumber: Sustainable Development Report 2020 \*Nilai Spillover Indeks berkisar antara 0-100, semakin tinggi semakin baik

## COVID-19 DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA



### Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Target menghapuskan kemiskinan kemungkinan besar tertunda. Lembaga Penelitian SMERU memprediksi jumlah warga miskin di Indonesia akan bertambah menjadi 1,3 juta hingga 8,5 juta jiwa atau meningkat antara 9,7% hingga 12,4% dari posisi September 2019 yang sebesar 9,2%.<sup>10</sup> Dengan proyeksi tertinggi, jumlah warga miskin Indonesia kurang lebih akan sama dengan kondisi tahun 2011<sup>11</sup> atau sembilan tahun lalu.

Data BPS terbaru juga telah menyatakan bahwa jumlah orang miskin per Maret 2020 meningkat menjadi 26,42 juta (9,78%).<sup>12</sup> Sedangkan Indonesia menargetkan angka kemiskinan sebesar 4-4,5% pada tahun 2030<sup>13</sup>. Sebelum Covid-19, salah satu tantangan Indonesia adalah mengurangi jumlah orang miskin di wilayah timur Indonesia<sup>14</sup>, namun adanya Covid-19 menjadikan persebaran kemiskinan menjadi lebih merata. Bahkan peningkatan jumlah warga miskin tertinggi terjadi di Jakarta.<sup>15</sup>

Meningkatnya jumlah warga miskin sudah diperkirakan sejak awal pandemi Covid-19, terlebih dengan fakta bahwa sebagian besar warga berada dalam kategori *aspiring middle class*.<sup>16</sup> Pembatasan sosial memudahkan *aspiring middle class* terlempar menjadi kelompok vulnerable atau bahkan kelompok miskin.

Pekerja informal, buruh pabrik dan harian serta pekerja migran, menjadi kelompok yang paling terdampak. Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS-TK, hingga akhir Mei jumlah tenaga kerja yang terdampak sebanyak 1.757.464 orang dan

---

<sup>10</sup> Suryahadi, A., Ridho A., Daniel S., (2020), The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia, SMERU Working Paper (Draft), SMERU Research Institute.

<sup>11</sup> Lihat <https://www.bps.go.id/pressrelease/2011/07/01/918/pada-bulan-maret-2011-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-mencapai-30-02-juta-orang.html>

<sup>12</sup> Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik 15 Juli 2020

<sup>13</sup> Target ini tercantum dalam dokumen Roadmap of SDGs Indonesia Towards 2030, Bappenas 2019

<sup>14</sup> Dalam dokumen Roadmap of SDGs Indonesia Towards 2030 disebutkan selain mengurangi kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur

<sup>15</sup> Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, 15 Juli 2020

<sup>16</sup> Bank Dunia membagi kategori penduduk Indonesia berdasar tingkat pendapatan/pengeluaran ke dalam lima kategori yaitu miskin, vulnerable, *aspiring middle class*, middle class dan upper class. Jumlah *aspiring middle class* di Indonesia sebanyak 115 juta orang. Kelompok ini memiliki pendapatan antara 2 hingga 4,8 juta rupiah. Lebih jauh lihat <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2020/01/30/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>

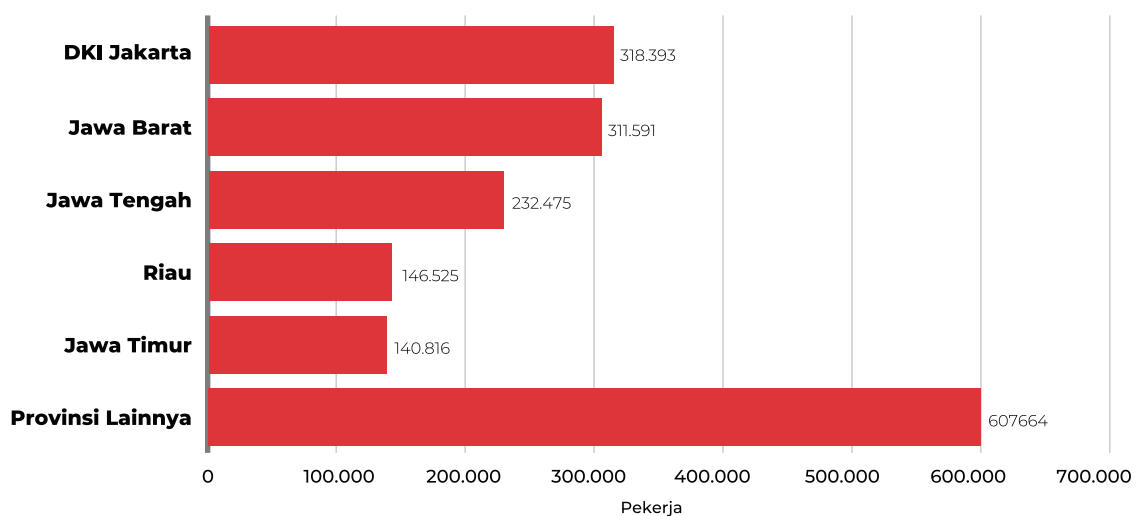
terbanyak terdapat di DKI Jakarta<sup>17</sup> (gambar 2). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat hingga 31 Agustus 2020, sudah sekitar 166.000 pekerja migran Indonesia pulang ke tanah air, sementara sekitar 48.000 calon pekerja migran Indonesia tertunda keberangkatannya.<sup>18</sup>

**Gambar 2. Sebaran Pekerja Terdampak Covid-19**

## PERSEBARAN PEKERJA TERDAMPAK COVID-19 DI INDONESIA

Tenaga Kerja Formal dan Informal Terdampak (1 April-27 Mei 2020)

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 2 April-27 Mei 2020



Sumber: Katadata 2020

Sementara hingga April 2020, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1,94 juta pekerja dari 114.340 perusahaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan (gambar 3).<sup>19</sup> Jumlah ini diperkirakan terus bertambah mengingat dampak pandemi terus berlanjut hingga laporan ini disusun.

<sup>17</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/09/persebaran-pekerja-terdampak-covid-19-di-indonesia>

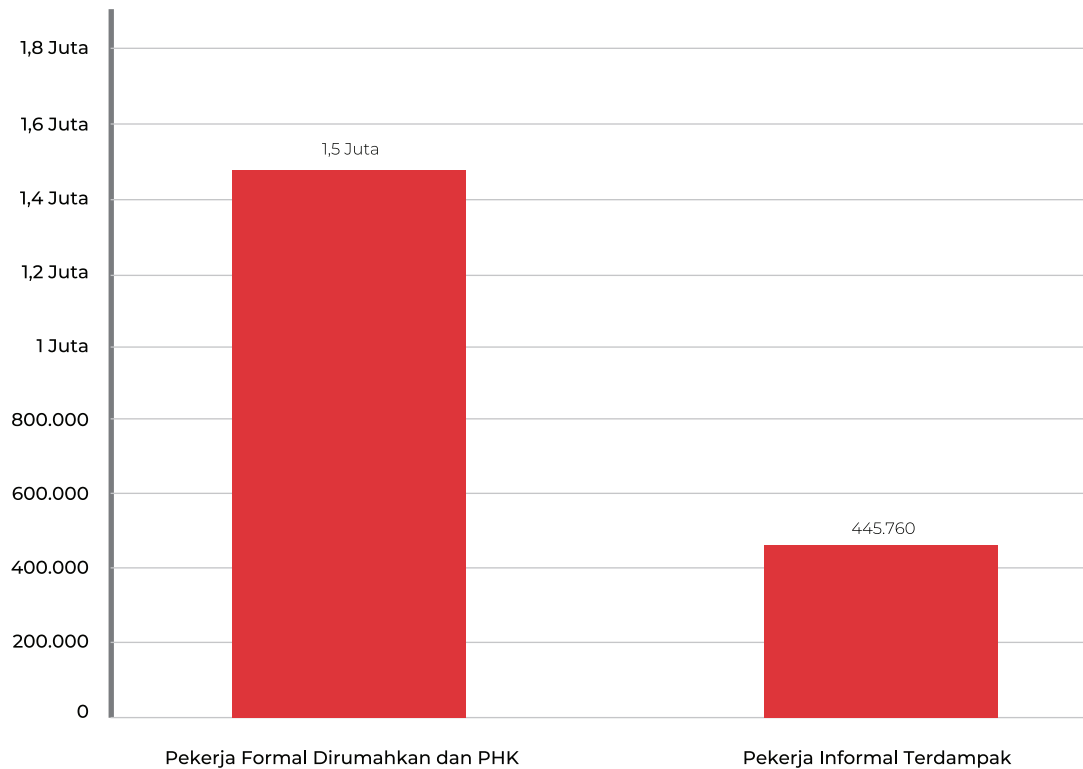
<sup>18</sup> Keterangan disampaikan Kepala BP2MI pada tanggal 10 September 2020 di acara Beritasatu TV.

<sup>19</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/09/pandemi-timbulkan-sederet-persoalan-ketenagakerjaan>

**Gambar 3. Pekerja yang Mengalami PHK**

## **PERKEMBANGAN PEKERJA TERDAMPAK COVID-19 (16 APRIL 2020)**

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 16 April 2020

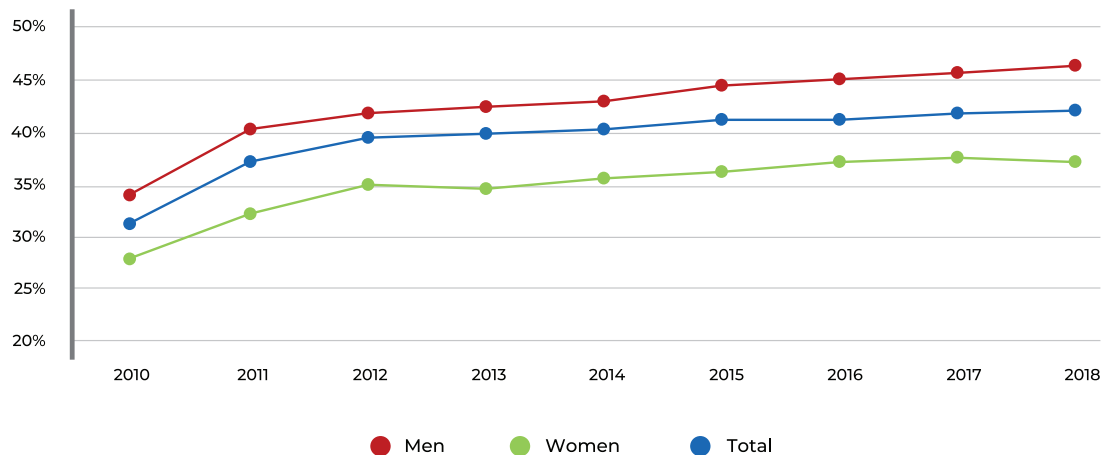


Sumber: Katadata 2020

Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak mengingat sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal<sup>20</sup>, sementara perempuan yang bekerja di sektor formal kurang dari 40% (Gambar 4). Kondisi ini berpotensi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.

<sup>20</sup> Lihat laporan Profil Perempuan Indonesia 2018 <https://www.kemennpppa.go.id/lib/uploads/list/d9495-buku-ppi-2018.pdf>

**Gambar 4. Proporsi Tenaga Kerja Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: Diolah dari data BPS

### **Kotak 1. Perlindungan Sosial dan Covid-19**

Perlindungan sosial telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan terutama saat terjadinya krisis seperti wabah Covid-19. Berdasar update situasi penanganan Covid-19 di Indonesia per 31 Agustus 2020, beberapa program Bantuan Sosial (Bansos) telah diberikan, baik program yang secara rutin telah berjalan maupun yang muncul sebagai respon terhadap wabah Covid-19 ([www.unocha.org](http://www.unocha.org)). Beberapa program tersebut adalah:

- Program Keluarga Harapan: telah membantu 10 juta keluarga, dengan penyerapan 71% atau Rp.26,6 triliun rupiah dari anggaran Rp.37,4 triliun
- Kartu Sembako: telah membantu 20 juta keluarga, dengan penyerapan Rp.26,3 triliun atau 60% dari anggaran Rp.43,6 triliun.
- Program Bansos Tunai dan Non Tunai: telah membantu 10,9 juta keluarga, dengan penyerapan 62%, atau Rp.24,2 triliun, dari anggaran Rp.39,2 triliun. Di bulan Agustus, program ini diperluas ke dua wilayah, yakni Rp.20,7 triliun untuk Non Jabodetabek dan Rp.3,5 triliun untuk Jabodetabek.
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: sudah dirasakan manfaatnya oleh delapan juta keluarga, dengan penyerapan 30% atau Rp.9,6 triliun dari anggaran Rp.31,8 triliun.
- Program Bantuan Subsidi Upah dengan anggaran Rp.37,8 triliun kepada total jumlah penerima 15,7 juta. Subsidi sebesar Rp. 600.000 per bulan diberikan dalam per dua bulan kepada pekerja formal non ASN dan perusahaan induk BUMN yang menjadi anggota BPJSTK dengan upah yang dilaporkan di bawah Rp. 5 juta per bulan.
- Program lainnya termasuk subsidi listrik, listrik gratis untuk rumah dengan daya maksimum 450 Va, dan Program Kartu Prakerja.

Sebagian besar program-program tersebut ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu (targeted) untuk melindungi dan mencegah warga menghadapi situasi yang lebih buruk akibat wabah Covid-19. Setelah berlangsung 6 bulan, skema jaring pengaman sosial untuk dampak COVID-19 masih memerlukan perbaikan yang mendasar, dalam soal updating pendataan yang belum merekam mobilitas penduduk dan belum didesain sebagai skema perlindungan sosial yang adaptif dan tanggap COVID-19)

## Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Berdasar data Global Hunger Index (GHI) 2019, 22 juta warga Indonesia masih menghadapi persoalan kelaparan yang serius.<sup>21</sup> Wabah Covid-19 menjadikan tantangan Indonesia bertambah besar. Perubahan rantai pasok pangan akibat pembatasan perdagangan dan fokus negara untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya menjadi tantangan pertama dampak Covid-19 terhadap kelaparan. Sementara, Indonesia masih melakukan impor untuk beberapa produk pangan seperti beras, bawang putih, daging sapi dan beberapa produk lain. Total impor pangan Indonesia sebesar 576,18 juta USD.<sup>22</sup>

Covid-19 juga mempengaruhi perubahan permintaan dan pasokan pangan serta secara tidak langsung melalui penurunan daya beli, perubahan kapasitas produksi dan distribusi. Kelompok rentan termasuk anak dan miskin menjadi yang paling terkena dampak. Makanan menjadi kontributor kemiskinan di Indonesia. Menurut catatan BPS, komoditi makanan menyumbang 73,86% terhadap garis kemiskinan.<sup>23</sup>

Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019 menunjukkan bahwa ada 76 Kota/Kabupaten di Indonesia yang masih mengalami kerentanan pangan.<sup>24</sup> Akses pangan dan meningkatnya jumlah warga miskin, dipastikan akan meningkatkan daerah rentan pangan di Indonesia. Pilihan kebijakan untuk mengatasi krisis pangan dengan rencana pembukaan *food estate* (pemanfaatan lahan gambut) alih-alih berkontribusi untuk memperkuat ketahanan pangan, ternyata berpotensi merusak lingkungan dan mengusur ekosistem masyarakat adat.

## Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Memastikan kehidupan yang sehat bagi semua orang, menjadi tujuan TPB yang paling terdampak langsung akibat Covid-19. Hingga 13 Agustus 2020, tercatat warga meninggal sebanyak 5.968 dari 132.816 yang terinfeksi.<sup>25</sup> Penyebaran dan tingginya angka kematian akibat wabah merupakan indikasi ketidaksiapan pemerintah termasuk lemahnya peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko (Tabel 4). Rencana Aksi Global Tujuan 3 TPB yang telah dirumuskan juga tidak berjalan dengan baik.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Global Hunger Index (GHI) adalah indeks yang mengukur tingkat kelaparan suatu negara berdasar empat indikator yaitu undernourishment, child wasting, child stunting dan child mortality. Tahun 2019, GHI Indonesia sebesar 20,1 yang artinya Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kelaparan.

<sup>22</sup> Amanta, Fellipa dan Ira Aprianti, Indonesiaa Food Trade Policy, Policy Brief Center for Indonesian Policy Studies, April 2020 <https://www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-indonesian-food-trade-policy-during-covid-193>

<sup>23</sup> Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, 15 Juli 2020

<sup>24</sup> Lihat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019,

<sup>25</sup> Hingga laporan ini disusun jumlah warga yang terinfeksi virus Covid-19 terus mengalami peningkatan.

<sup>26</sup> Rencana Aksi Global Tujuan 3 TPB menegaskan tujuh akselerator utama yaitu (1) perawatan kesehatan primer (2) pembiayaan berkelanjutan untuk kesehatan (3) keterlibatan komunitas dan masyarakat sipil (4) determinan/penentu kesehatan (5) program inovatif di lingkungan yang rentan dan respons terhadap wabah (6) penelitian, pengembangan, inovasi dan akses (7) data kesehatan dan data digital (<https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan>)



Sistem layanan kesehatan masyarakat di Indonesia mengalami tekanan luar biasa terlebih saat penyebaran virus belum mereda, pada sisi lain aktivitas ekonomi telah kembali dibuka. Covid-19 juga menyebabkan tekanan yang tinggi pada kapasitas riset dan pengembangan serta manufaktur kesehatan. Kebutuhan alat pelindung diri, ventilator dan obat-obatan meningkat tajam.

**Tabel 4**  
Target 3 TPB yang Terkait Langsung dengan Wabah Penyakit

NO	TARGET	INDIKATOR
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai dengan Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1. Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan  3.b.2. Total Official Development Assistance (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
3.d	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global	3.d.1. Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan kesiapsiagaan darurat kesehatan

Meski Covid-19 dapat menyerang siapapun, namun warga miskin terutama yang tinggal di perkotaan sangat berpotensi terserang wabah. Keterbatasan untuk menjaga jarak karena tinggal di wilayah yang padat, akses infrastruktur air bersih dan sanitasi yang terbatas menjadi faktor penyebab. Terlebih jika diantaranya banyak yang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kelompok lain yang sedari awal berpotensi terkena wabah adalah pekerja migran. Para pekerja migran berada di episentrum awal penyebaran Covid-19.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Lihat Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah Covid-19 file:///C:/Users/thinkpad/Downloads/CSIS\_Commentaries\_DMRU\_024\_SusiloAristaEvi.pdf

Prioritas pada penanganan Covid-19 baik dari alokasi anggaran atau pun sumber daya manusia, mengakibatkan banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban.<sup>28</sup> Selain itu juga berpotensi mengurangi upaya-upaya penanganan problem kesehatan lainnya. Sebelum Covid-19, Indonesia masih menghadapi tantangan defisit tenaga kesehatan.<sup>29</sup> Sementara pada saat yang sama, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mengatasi tingginya kematian ibu dan anak, penyakit TBC, malaria dan HIV/AIDS.

Tantangan lain adalah akses warga terhadap vaksin. Menurut Oxfam, memastikan keterbukaan pengetahuan, produksi dan distribusi yang adil, harus dilakukan agar seluruh warga terutama kelompok rentan dapat memperoleh vaksin Covid-19<sup>30</sup>. Kebutuhan anggaran untuk menyediakan vaksin tidak kecil mengingat untuk mencapai kekebalan tiap warga membutuhkan dua kali vaksinasi ditambah dengan besarnya populasi penduduk Indonesia.<sup>31</sup>

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kesehatan mental. Survei yang dilakukan oleh Laporcovid-19 dan Kelompok Peminatan Intervensi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menemukan adanya stigma sosial terhadap warga yang terpapar virus terutama perempuan. Bentuk stigma sosial tersebut antara lain menjadi bahan perbincangan dan pengucilan yang menyebabkan munculnya rasa khawatir, sedih, kecewa hingga mati rasa.<sup>32</sup>

#### **Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas**

Pendidikan menjadi instrumen penting Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Meski nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat setiap tahun namun pemerataan pembangunan manusia di Indonesia masih menjadi tantangan. Nilai Inequality Adjusted Human Development Index (IHDI) tahun 2019 sebesar 0,584, sedangkan nilai HDInya sebesar 0,707. Selain ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan berkontribusi cukup besar terhadap rendahnya IHDI Indonesia. Akses dan mutu pendidikan tantangan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

---

<sup>28</sup> Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal di Indonesia tercatat 100 orang yang terdiri dari 61 orang dokter dan 39 perawat <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/125100165/3000-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19-ini-negara-terbanyak?page=all>

<sup>29</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26183/t/Defisit+Tenaga+Kesehatan+PR+Serius+Menteri+Kesehatan+Baru>

<sup>30</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/170000626/muncul-desakan-agar-vaksin-covid-19-bisa-didistribusikan-secara-gratis-?page=all>

<sup>31</sup> Kebutuhan vaksin diperkirakan mencapai 340 juta untuk 170 juta warga <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4276764/butuh-340-juta-vaksin-corona-indonesia-libatkan-perusahaan-china-dan-korsel>. Memastikan ketersediaan vaksin untuk semua juga selaras dengan target 3.b TPB.

<sup>32</sup> Update Situasi Penanganan COVID-19 di Indonesia (31 Agustus 2020). Diakses dari: [www.unocha.org](http://www.unocha.org)

<sup>33</sup> Human Development Index Report 2019

**Tabel 5**

Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (Inequality Adjusted Human Development Index/IHDI)

Nilai IPM	Nilai Ketimpangan IPM	Ketimpangan Usia harapan Hidup	Ketimpangan dalam Pendidikan (%)	Ketimpangan dalam Pendapatan (%)	Koefisien ketimpangan (%)
0.707	0.584	13,9	18.2	20,1	17,4

Sumber: Human Development Index (2019)

Wabah Covid-19 menjadikan tantangan-tantangan tersebut semakin terlihat. Penutupan sekolah sebagai respons atas Covid-19 menyebabkan 45 juta siswa tidak dapat mengikuti proses belajar dengan normal. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membutuhkan waktu penyesuaian dan berpotensi menimbulkan ketimpangan pembelajaran. Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan secara keseluruhan dan meningkatnya ketimpangan pencapaian pendidikan<sup>34</sup>. Tidak semua warga memiliki perangkat digital seperti laptop, komputer dan atau *smartphone*.<sup>35</sup> Ketersediaan perangkat tersebut belum termasuk biaya yang harus disediakan orang tua untuk menyediakan fasilitas internet. Hal lain yang menjadi tantangan PJJ adalah kualitas jaringan internet di Indonesia yang belum merata. Metode PJJ menambah beban biaya untuk warga dan kelompok rentan dan yang tinggal di wilayah terpencil menjadi yang paling terkena dampak. PJJ yang berlangsung saat ini juga belum didesain dengan metode dan kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pembelajaran darurat. Pola yang berlangsung hanya memindah ruang kelas ke rumah, padahal seharusnya ada dimensi *sense of crisis*.

Kemunduran ekonomi yang berdampak pada rumah tangga juga akan berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Jumlah angka putus sekolah diperkirakan akan naik<sup>36</sup>. Kemampuan rumah tangga untuk menunjang kualitas pendidikan menurun seperti membeli buku ataupun memberikan kursus tambahan. Di samping itu, dengan tidak berubahnya jumlah biaya pendidikan, hal ini sangat tidak adil jika siswa atau orang tua harus membayar biaya yang sama dengan pembelajaran secara langsung/tatap muka. Hal ini memberatkan rumah tangga, sehingga potensi kenaikan anak putus sekolah ditambah dengan menurunnya kualitas proses belajar berdampak meningkatnya pekerja anak.<sup>37</sup> Situasi ini apabila terjadi dalam jangka panjang memiliki potensi untuk berdampak pada produktivitas dan pendapatan.

<sup>34</sup> Lihat <http://sdgcenter.unpad.ac.id/pencapaian-agenda-pendidikan-berkualitas-untuk-semua-sdg-4-di-tengah-disrupsi-pandemi-covid-19/>

<sup>35</sup> Kepemilikan laptop di Indonesia hingga tahun 2018 hanya sebesar 21,36%, sedangkan kepemilikan komputer sebesar 7,97%. Untuk kepemilikan telepon pintar (*smartphone*), sebanyak 66,3%./

<sup>36</sup> <https://republika.co.id/berita/qdec3h382/10-juta-anak-terancam-putus-sekolah-akibat-pandemi-covid19>

<sup>37</sup> <https://kompas.id/baca/riset/2020/07/24/waspadai-lonjakan-pekerja-anak-akibat-covid-19/>

## **Kotak 2. Relaksasi Dana BOS dan Subsidi Kuota Internet**

Tersendatnya proses belajar mengajar membuat pemerintah mengambil beberapa langkah untuk membantu terlaksananya proses pembelajaran jarak jauh. Beberapa langkah yang diambil adalah pertama, Kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengalokasikan dana BOS penyediaan kuota internet, penyediaan kebutuhan kesehatan dan pembayaran guru honorer.

Kedua, menyediakan dana tambahan untuk memberikan subsidi kuota internet sebesar 35 GB/bulan untuk siswa, 42 GB/bulan untuk guru dan 50 GB/pulan untuk dosen dan mahasiswa, dari bulan September hingga Desember 2020.

### **Tujuan 5. Kesetaraan Gender**

Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak akibat wabah Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ketimpangan akses layanan kesehatan dan ekonomi serta kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan yang mengemuka akibat Covid-19.

Pada isu kesehatan, banyak tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19 dan sebagian besar adalah perempuan. Amnesty International mencatat hingga 13 Juli 2020, setidaknya 89 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid-19, yaitu mencakup dokter, dokter gigi dan perawat. Sementara itu, setidaknya terdapat total 878 dokter dan perawat dari seluruh penjuru Indonesia yang terinfeksi virus tersebut.<sup>38</sup>

Perempuan disabilitas mendapatkan beban yang lebih besar karena banyak fasilitas kesehatan yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan itu sendiri menjadi dua persoalan besar penyandang disabilitas terutama perempuan. Selain itu, Covid-19 juga menyebabkan persoalan terhadap kesehatan reproduksi.<sup>39</sup> Jumlah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) meningkat yang dikarenakan adanya penurunan jumlah pelayanan KB secara nasional dari masing-masing jenis alat obat kontrasepsi (alokon). Hal ini diindikasikan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang memerlukan kontrasepsi

---

<sup>38</sup> <https://www.amnesty.id/laporan-global-tenaga-kesehatan-dibiarkan-terpapar-dibungkam-dan-diserang/>

<sup>39</sup> <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/06/04/selama-pandemi-covid-19-terjadi-peningkatan-kehamilan-hingga-sekitar-400000-kasus-ini-sebabnya>

tidak bisa mengakses layanan kontrasepsi di faskes dan menunda ke faskes selama Covid-19 jika tidak dalam kondisi gawat, karena adanya kekhawatiran PUS yang memerlukan kontrasepsi tertular Covid-19.<sup>40</sup> Kehamilan yang tidak diinginkan dan lingkungan yang tidak mendukung akibat pembatasan sosial, berpotensi terhadap kematian ibu dan bayi.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu isu yang terus mengemuka. Sebelum wabah Covid-19 melanda, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.<sup>41</sup> Pembatasan sosial mengakibatkan banyak perempuan kehilangan pendapatan. Banyak usaha gulung tikar diantaranya sektor perhotelan, makanan dan minuman, yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan.<sup>42</sup> Kerentanan ekonomi ini berdampak pada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan<sup>43</sup>, Pekerja migran yang sebagian besar perempuan<sup>44</sup> dan sektor informal juga menjadi kelompok yang terkena dampak. Beban kerja yang semakin meningkat akibat penutupan sekolah dan bekerja dari rumah dan atau kehilangan pekerjaan turut berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beberapa organisasi perempuan memperkirakan adanya peningkatan angka perkawinan anak di masa pandemi. Ini didasarkan pada hasil pemantauan dan asesmen yang dilakukan di beberapa wilayah, terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Situasi ini juga mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh UNICEF yang memperkirakan adanya eskalasi angka perkawinan anak di tingkat global.

## **Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Tersedianya air bersih menjadi menjadi komponen utama mencegah penyebaran wabah. Meski Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam menyediakan akses air bersih, namun tantangan yang dihadapi masih tinggi. Rendahnya cakupan layanan PDAM<sup>45</sup> menjadikan banyak warga menggantungkan akses air bersih dari sumur, mata air atau bahkan air kemasan. Ketergantungan yang tinggi pada jaringan non perpipaan, menjadikan akses air bersih warga sangat rentan dari

---

<sup>40</sup> <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/cara-bkkbn-cegah-kehamilan-tidak-diinginkan-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-cegah-odha-tertular-covid-1>

<sup>41</sup> Berdasar Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan (2019), kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah private, publik dan negara.

<sup>42</sup> Muhammad Adi Rahman dkk, Situasi Ketenagakerjaan di Lapangan Usaha yang Terdampak Covid-19, Catatan Isu SMERU No.1/Juni/2020

<sup>43</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/dr-reisa-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ri-meningkat-75-sejak-pandemi-corona-1tmFjFPVEjT>

<sup>44</sup> Lihat Perempuan Pekerja Migran; Aktor Pembangunan Yang Tertinggal

<sup>45</sup> Hingga tahun 2018 cakupan air bersih di Indonesia sebesar 88%, 68% dipenuhi melalui jaringan non perpipaan sementara 20% dipenuhi melalui jaringan perpipaan.

akses air yang aman.<sup>46</sup> Terlebih jika terjadi bencana hidrologi, dimana setiap tahun kekeringan selalu terjadi di Indonesia.

Keterbatasan akses air bersih dialami oleh warga yang tinggal di pemukiman kumuh (*slum area*). Selain terbatasnya jaringan perpipaan, sumber air lainnya biasanya tidak memenuhi standar air minum aman akibat padatnya hunian. Warga akan membeli air bersih yang harganya jauh lebih mahal.<sup>47</sup> Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep *water democracy* dimana akses terhadap air merupakan hak asasi manusia. Konsep ini sejalan dengan *The Water Vision 21 i.e* air untuk masyarakat, pasokan makanan, dan alam. Visi 'air untuk semua' (atau untuk masyarakat) berdasar pada asas hak asasi manusia yang mencakup pemerataan, keterjangkauan dan akses air. Selain itu, ketahanan pangan dan jaminan pangan yang cukup dan aman merupakan komponen nyata dalam visi 'air untuk pangan'. Efisiensi, partisipasi pengguna, dan harga adalah bagian fundamental yang terkait dengan hak asasi manusia dalam deklarasi PBB.

Kondisi ekonomi yang semakin buruk, menjadikan beban warga semakin meningkat. Potensi keterbatasan akses air bersih warga juga akan terjadi akibat musim kemarau yang telah memasuki sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini akan mengancam tidak hanya warga yang tinggal di perkotaan namun juga di pedesaan. Situasi ini tidak hanya berpotensi terhadap meluasnya penyebaran wabah namun juga dapat menambah beban kerja perempuan<sup>48</sup>.

## **Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau**

Akses terhadap listrik menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi Covid-19. Fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, komunikasi sesama warga, penyebarluasan informasi, hingga pembelajaran jarak jauh membutuhkan akses listrik. Secara umum, meski rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 98%, namun Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas, keberlanjutan dan kemanfaatan energi untuk menunjang ekonomi produktif. Karenanya ketiga tantangan tersebut harus menjadi prioritas Indonesia ke depan.

Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan konsumsi listrik rumah tangga meningkat. Bagi warga miskin, kondisi ini semakin memberatkan di saat kondisi ekonomi memburuk. Sementara konsumsi listrik industri, bisnis dan sosial terjadi penurunan. Hal ini akan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kinerja penyedia layanan listrik<sup>49</sup>. Pemerintah memang telah meluncurkan skema keringanan untuk pengurangan beban pembayaran tarif listrik untuk konsumen bawah. Namun

---

<sup>46</sup> Kriteria akses air yang aman adalah (i) berasal dari sumber air yang layak (ii) tersedia di dalam/halaman rumah (iii) tersedia saat dibutuhkan (iv) memenuhi standar kualitas fisik, kimia dan biologi air minum

<sup>47</sup> Warga yang tinggal di pemukiman padat Jakarta harus membeli air yang harganya lebih mahal akibat akses air yang belum tersedia <https://tirto.id/pengelolaan-air-bersih-jakarta-swasta-untung-pam-jaya-buntung-cJ7I>

<sup>48</sup> Lihat <http://documents1.worldbank.org/curated/en/257891467999387680/pdf/101178-BAHASA-WP-P085375-PUBLIC-Box393259B.pdf>

<sup>49</sup> Lihat <https://republika.co.id/berita/q96q0y380/dampak-pandemi-pln-berpotensi-rugi-rp-44-triliun>

karena sosialisasi dan tata kelola distribusi yang buruk, skema ini belum dapat menjangkau keseluruhan segmentasi konsumen yang disasar.

Pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk mendorong peningkatan energi terbarukan dan efisiensi energi serta pengurangan emisi. Namun hal tersebut sangat bergantung kebijakan energi berkelanjutan di Indonesia, pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan harga minyak pada tingkat global. Jika harga minyak tetap rendah, pemulihan ekonomi yang cepat untuk mengejar pertumbuhan (GDP), momentum Covid-19 akan hilang.

### **Tujuan 8. Kerja Layak dan Pertumbuhan Inklusif**

Pembatasan sosial yang berkepanjangan dan ketakutan akan kemungkinan gelombang kedua dan ketiga dari virus turut berdampak pada meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Ini akan menurunkan pasokan dan permintaan di seluruh dunia secara bersamaan. *World Trade Organization* (WTO) memperkirakan perdagangan barang global akan turun antara 13% sampai 32% tahun ini. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan menyusut 3 persen. Negara maju diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen, dan negara berkembang diharapkan tumbuh rata-rata hanya 1 persen pada tahun 2020.<sup>50</sup> Kontraksi ekonomi menjadi ketakutan yang dihadapi semua negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua mengalami kontraksi -5,32%<sup>51</sup> Konsumsi terganggu, hanya konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan.

Kontraksi ekonomi berdampak langsung terhadap meningkatnya angka pengangguran. Diperkirakan jumlah pengangguran akan meningkat hingga 17 juta orang.<sup>52</sup> Kelompok anak muda semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan, selain akibat Covid-19 juga karena persoalan *miss-match* antara jenis pekerjaan yang tersedia dengan keterampilan yang dimiliki.

Industri penerbangan dan pariwisata, menjadi sektor yang paling awal terkena dampak. Kemudian diikuti industri-industri lainnya. Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga terancam. Sementara saat sebelum Covid-19, UMKM berkontribusi terhadap 60% total GDP dan 97,02% pekerja. Daya beli menurun dan investor menahan diri untuk berinvestasi, membeli barang dan memperkerjakan orang.

Pekerja informal yang mendominasi pasar kerja dan sebagian besar diisi oleh perempuan mengalami tekanan hebat. Kebanyakan pekerja informal bekerja pada sektor akomodasi, makanan dan minuman, yang merupakan industri yang paling

---

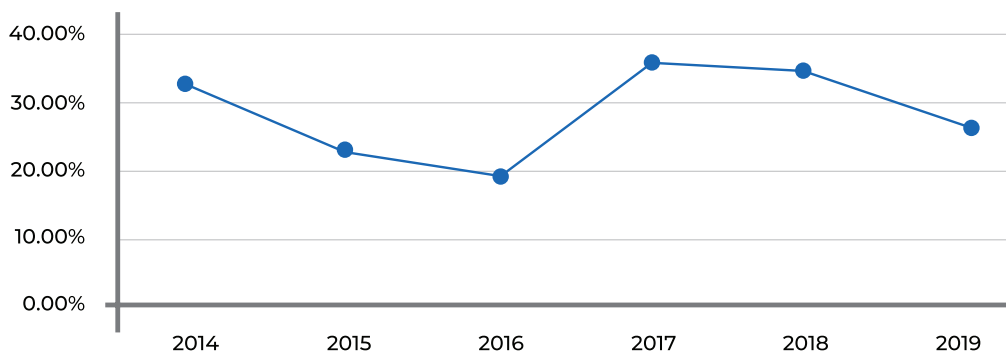
<sup>50</sup> <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/30/how-covid-19-impacts-indonesias-trade.html>

<sup>51</sup> Berita Resmi Statistik, BPS, 5 Agustus 2020

<sup>52</sup> Lihat <https://katadata.co.id/muhammadrhdhoi/indepth/5eed5ed1d1aae/proyeksi-suram-ekonomi-indonesia-dan-dampak-turunannya>

terpukul akibat pembatasan sosial<sup>53</sup>. Tekanan terhadap pekerja perempuan semakin besar karena sebagian bekerja di sektor jasa, seperti menjadi perawat, dan asisten rumah tangga. Perempuan juga banyak bekerja di bidang seni dan hiburan serta menjadi pekerja migran. Gambar berikut menggambarkan persentase pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor domestik. Dalam kaitan interseksi pewujudan kerja layak dengan dimensi perdagangan manusia, Migrant CARE mencatat layanan langsung dan akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia menjadi terhambat selama masa pandemi akibat berbagai pembatasan sosial dan kebijakan sekuritisasi.

**Gambar 5. Presentase Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik**



Sumber: Diolah dari Data BP2MI

<sup>53</sup> Muhammad Adi Rahman dkk, Situasi Ketenagkerjaan di lapangan Usaha yang Terdampak Covid-19, Catatan Isu SMERU No.1/Juni/2020



### **Kotak 3 Mendorong Pertumbuhan dan Mengurangi Pengangguran**

Beberapa program untuk membantu menyelamatkan Usaha Kecil dan Mikro Menengah (UMKM) sebagai upaya penguatan sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Melalui perbankan telah tersalurkan dana ke 1,02 juta UMKM dengan capaian 52,3% dari anggaran 78,8 triliun, serapan Subsidi Bunga mencapai 6,12% dari alokasi Rp.35,3 triliun, dan telah membantu 7,2 juta pelaku UMKM dengan subsidi total Rp.2,2 triliun untuk total nilai pinjaman Rp.277 triliun.
2. Sebagai program terbaru yang diluncurkan 24 Agustus, Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres Produktif) dengan anggaran Rp.22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro di berbagai sektor, yang dapat diperluas menjadi 12 juta usaha mikro dengan anggaran menjadi Rp 28,8 triliun. Dalam seminggu pertama, Banpres tersebut sudah disalurkan kepada 1 juta pengusaha mikro yang masing-masing mendapat bantuan langsung tunai Rp.2.400.000.

Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah membuat Program Padat Karya Kementerian/Lembaga yang sudah mencapai lebih dari 3 juta pekerja dengan anggaran Rp.18,4 triliun dan menyerap 49% atau Rp. 9 triliun. Kementerian PUPR telah memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/*cash for work*), mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap dengan total anggaran Rp.1,2 triliun. Dalam tiga bulan ke depan, Program ini diharapkan mampu menyerap 28.000 tenaga kerja.

### **Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Sebagian besar industri mengalami penurunan *output*. Meski belum ada angka yang pasti, namun diprediksi akan banyak usaha yang menutup usahanya. Berdasar data BPS, hanya sektor pertanian, pengadaan air dan informasi dan telekomunikasi yang tumbuh positif di masa Covid-19. Akomodasi, makan dan minum serta transportasi dan perdagangan menjadi industri yang paling terdampak negatif.

Situasi ini juga diperparah dengan kontraksi ekonomi pada banyak negara, terutama di negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Ekspor Indonesia mengalami penurunan drastis terutama pada kuartal kedua 2020. Pembangunan infrastruktur juga banyak yang tertunda atau bahkan dihentikan.

Fakta bahwa sektor pertanian tetap tumbuh di tengah pandemi, menjadi kabar baik untuk Indonesia. Industri air minum juga menjadi sektor penting di masa krisis Covid-19 yang perlu mendapat perhatian ke depan, terlebih Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih di beberapa wilayah. Selain kedua sektor tersebut, industri kesehatan juga menjadi industri strategis, terlebih wabah belum dapat dipastikan kapan berakhir. Sebagai contoh, keterbatasan alat pelindung diri menjadi masalah tersendiri di saat awal wabah.

Situasi pandemi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pembiayaan di bidang Research and Development untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat mendorong upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

### **Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan**

Covid-19 secara jelas berdampak terhadap kelompok warga secara tidak merata. Kelompok rentan dan pekerja berupah rendah menjadi kelompok yang paling beresiko baik dari sisi kesehatan maupun kondisi kerja. Sifat dan jenis pekerjaan mengakibatkan tidak semua pekerja bisa melakukan kerja dari rumah (*work from home*).

Indikasi meningkatnya ketimpangan pendapatan<sup>54</sup> sudah terlihat di Indonesia. Berdasar data BPS gini ratio di Indonesia per Maret 2020 sebesar 0,381 meningkat 0,001 dibanding September 2019. Ketimpangan pendapatan meningkat baik di desa maupun di kota, meski kenaikan lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan.<sup>55</sup> Penurunan bahkan hilangnya pendapatan sebagian warga terutama kelompok rentan akibat Covid-19 menjadi penyebab utama naiknya ketimpangan, ditambah terbatasnya ragam perlindungan sosial<sup>56</sup> untuk kelompok-kelompok terdampak Covid-19.

Covid-19 juga memberikan gambaran lebih jelas ketimpangan kesempatan di Indonesia. Pada aspek pendidikan, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki laptop atau pun *smartphone* hingga akses internet. Layanan

---

<sup>54</sup> Ketimpangan pendapatan merupakan persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Berdasar data Credit Suisse angka rata-rata kekayaan orang Indonesia per orang dewasa pada 2019 mencapai US\$10,545 per orang dewasa. Namun, angka median dari kekayaan per orang dewasa di Indonesia hanya US\$1.977 per orang dewasa. Credit Suisse mencatat terdapat 173 juta populasi orang dewasa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 82 persen di antaranya hidup dengan kekayaan di bawah US\$10.000, jauh di atas rata-rata global dimana orang dewasa yang hidup dengan kekayaan di bawah US\$10.000 hanya 58 persen. Jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan di atas US\$100.000 hanya 1,1 persen, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,6 persen

<sup>55</sup> Gini rasio di perkotaan sebesar 0,393 sedangkan di pedesaan sebesar 0,317

<sup>56</sup> Menurut ILO kesenjangan dalam perlindungan sosial saat ini dapat mengancam rencana pemulihan, membuat jutaan orang jatuh miskin dan memengaruhi kesiapan global untuk menghadapi krisis serupa pada masa yang akan datang. Menurut data laporan ILO (2020) sebanyak 55 persen populasi dunia, atau sekitar empat miliar orang, tidak ditanggung oleh asuransi sosial maupun bantuan sosial. Secara global, hanya 20 persen dari pengangguran yang dilindungi oleh tunjangan pengangguran, dan di beberapa wilayah cakupan perlindungan tersebut jauh lebih rendah (<https://www.egindo.co/ilo-wabah-covid-19-timbulkan-kesenjangan-sosial/>)

kesehatan juga tidak tersedia merata<sup>57</sup>, baik antar kelompok warga maupun antar wilayah. Demikian pula halnya dengan akses air bersih dan listrik.

Data Bank Indonesia pada Kuartal 1 dan Kuartal 2 tahun 2020 menunjukkan tren penurunan perolehan remitansi dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini tentu memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi regional terutama di daerah basis pekerja migran.

## **Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**

Kepadatan baik di dalam maupun antar rumah, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi menjadi beberapa ciri yang melekat di *slum area*. Secara ekonomi, sebagian besar adalah ekonomi informal yang dengan situasi kepadatan wilayah membuat banyak orang berkumpul. Jika menderita sakit atau bahkan terpapar virus, pendapatan bisa langsung hilang. Kondisi ini yang menyebabkan wilayah *slum area* sangat rentan terhadap Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Jumlah warga Indonesia yang tinggal di *slum area* diperkirakan sebanyak 33 juta jiwa.<sup>58</sup> Data BPS juga menunjukkan jumlah warga miskin di wilayah perkotaan meningkat lebih tinggi timbang wilayah pedesaan.<sup>59</sup>

Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Terlebih Indonesia juga menjadi wilayah yang rentan bencana dengan wilayah rentan yang luas dan terpencar. Sementara laju urbanisasi juga terus meningkat.<sup>60</sup> Mengembangkan kota yang memiliki daya

---

<sup>57</sup> Sebagian besar perlindungan sosial di Indonesia bersifat targeted. BPJS Kesehatan yang bersifat universal dan berbasis iuran juga belum bisa dijadikan tumpuan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy Masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai adalah contoh kasus ketimpangan akses terhadap Jaminan Kesehatan (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/18215621/pandemi-covid-19-membuat-ketimpangan-akses-atas-kesehatan-terlihat-jelas>)

<sup>58</sup> Lihat [https://economy.okezone.com/read/2014/07/16/471/1013503/2015-33-juta-penduduk-tinggal-di-kawasan-kumuh#:~:text=JAKARTA%20%2DKementerian%20Pekerjaan%20Umum%20\(PU,kabupaten%2Fkota%20di%20seluruh%20Indonesia.](https://economy.okezone.com/read/2014/07/16/471/1013503/2015-33-juta-penduduk-tinggal-di-kawasan-kumuh#:~:text=JAKARTA%20%2DKementerian%20Pekerjaan%20Umum%20(PU,kabupaten%2Fkota%20di%20seluruh%20Indonesia.)

<sup>59</sup> Kemiskinan di perkotaan per Maret 2020 sebesar 12,82% sedangkan di pedesaan sebesar 7,38%. Peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebesar 1,11%

<sup>60</sup> Diperkirakan 68% penduduk akan tinggal di perkotaan pada tahun 2035. Meningkatnya urbanisasi tersebut selain akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota, juga akibat tingkat kelahiran di kota dan alih fungsi lahan pedesaan menjadi lahan perkotaan (lihat Wicaksono, S. (2020), Kota Untuk Semua; Hunian yang Selaras dengan Sustainable Development Goals dan New Urban Agenda, Jakarta, Mizan Expose dan Ruang Waktu)

tahan, inklusif sekaligus mampu berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan kiranya harus menjadi prioritas utama ke depan.<sup>61</sup>

Pandemi juga telah memperlihatkan bahwa tata kelola dan ketersediaan transportasi publik menjadi hal yang mutlak yang bisa menentukan apakah moda transportasi bisa tetap mendukung aktivitas warga di masa pandemi atau malah menjadi pembentuk kluster penularan COVID-19.

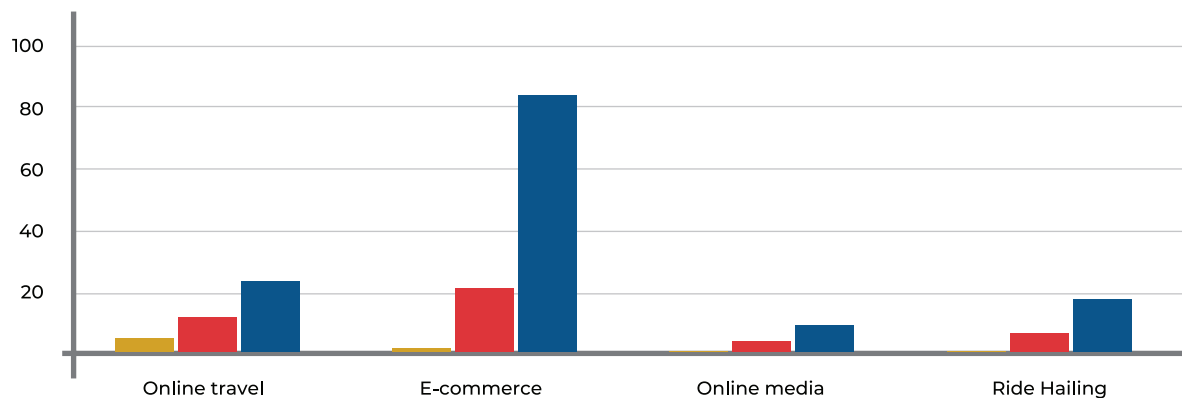
### Tujuan 12. Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab

Kehidupan normal sehari-hari terganggu akibat Covid-19. Menghentikan kebiasaan yang selama ini dilakukan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru, menjadi pilihan yang dilakukan banyak warga. Kondisi ini pada satu sisi menjadi beban, namun pada sisi lain menjadi peluang untuk mendorong produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Dari sisi perilaku ekonomi, pandemi Covid-19 telah mengubah cara belanja masyarakat dari luring menjadi daring. Berdasarkan riset yang dilakukan Savills, penyedia layanan *real estate* global, ekonomi daring di Indonesia meningkat dengan adanya perubahan kebiasaan pada era kenormalan baru.<sup>62</sup>

**Gambar 6. Ekonomi Daring Indonesia 2015 - 2025**

#### EKONOMI DARING INDONESIA, 2015-2025



Sumber: Savills World Research, 2020

<sup>61</sup> Empat karakteristik kota yang dapat berkontribusi terhadap kemiskinan yaitu (1) menyediakan ruang ber huni layak, (2) menyediakan ruang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (3) memiliki program afirmatif sosial ekonomi sosial ekonomi bagi warga miskin, dan (4) membayar kompensasi sosial ekonomi kepada warga miskin di wilayah lain yang sumber daya alamnya disedot untuk kepentingan kota tersebut, Ibid

<sup>62</sup> <https://lokadata.id/artikel/pandemi-korona-percepat-perubahan-tren-belanja-masyarakat>

Di samping itu, pola hidup sehat, mobilitas dan interaksi warga, penyediaan makanan dan penggunaan air dan energi yang lebih efisien serta metode kerja, merupakan beberapa perubahan yang sedang terjadi. Namun perubahan tersebut, belum dapat dipastikan sebagai perubahan yang permanen dan jangka panjang.

Berdasar analisa Google terhadap enam jenis pergerakan masyarakat, diketahui terjadi perbedaan mobilitas warga saat sebelum sebelum adanya pandemi Covid-19, setelah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pemberlakuan normal baru. Perbedaan mobilitas tersebut adalah sebagai berikut.<sup>63</sup>

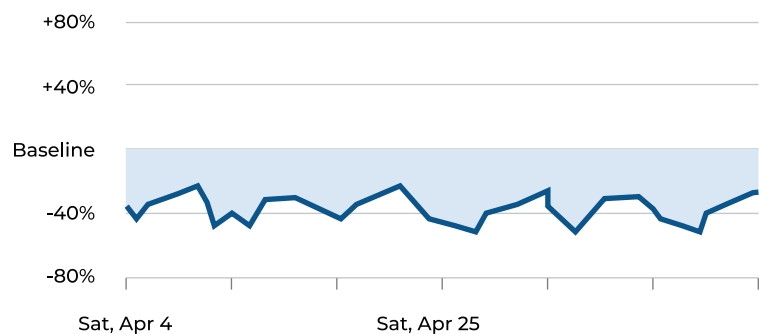
### 1. Retail dan rekreasi

Hasil survei menunjukkan data dari 4 April-16 Mei 2020 menunjukkan adanya penurunan sebanyak 37 persen dari kondisi normal. Sementara data dari 26 Juli sampai 6 September 2020 menunjukkan adanya penurunan sebanyak 4 persen dari baseline atau kondisi normal.

#### RETAIL & RECREATION

**-37%**

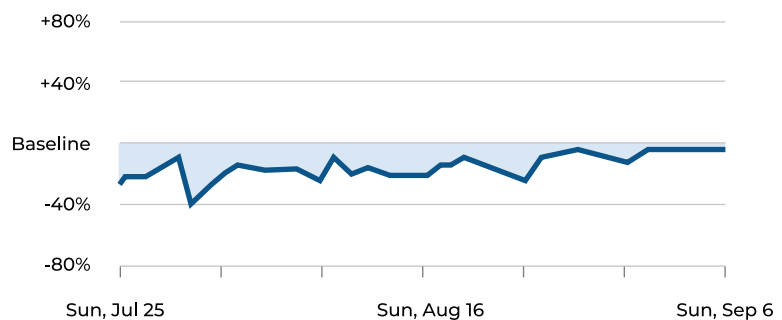
compared to baseline



#### RETAIL & RECREATION

**-4%**

compared to baseline



<sup>63</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/181500765/google-analisis-mobilitas-masyarakat-selama-pandemi-covid-19-ini-hasilnya-?page=3>

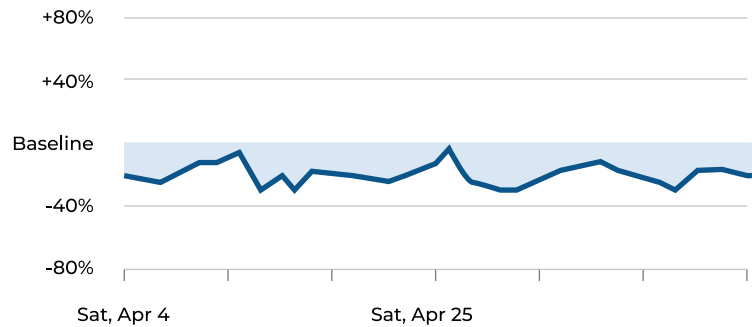
## 2. Belanja kebutuhan harian dan obat-obatan

Mobilitas belanja masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun belanja obat-obatan dan kebutuhan medis, terpantau mengalami penurunan sebanyak 8 persen pada April hingga Mei 2020, namun meningkat 4 persen dalam pada Juli hingga September 2020.

### GROCERY & PHARMACY

**-8%**

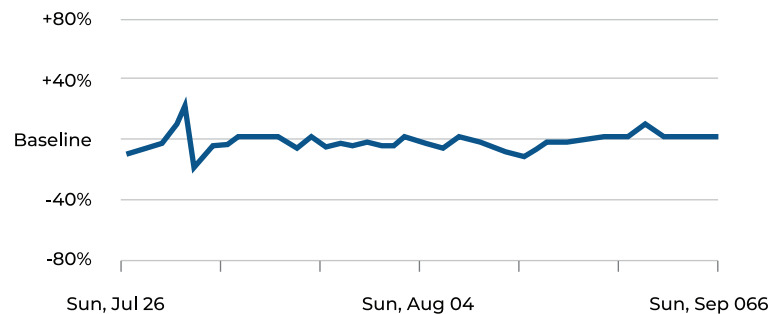
compared to baseline



### GROCERY & PHARMACY

**+4%**

compared to baseline



## 3. Ruang terbuka hijau

Kunjungan masyarakat ke sejumlah tempat terbuka yang bersifat umum mengalami penurunan drastis yakni sebanyak 43% dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid 19. Namun terpantau mengalami peningkatan kunjungan dalam masa pelonggaran pembatasan sosial, hingga penurunannya berkurang sampai 2% pada kurun waktu Juli sampai September 2020.

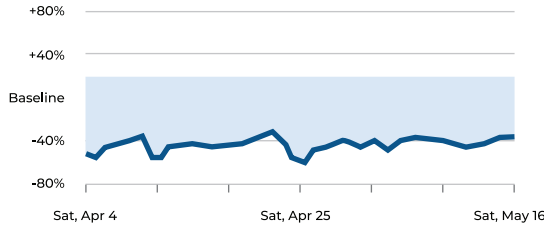
## 4. Transportasi publik

Dalam penggunaan transportasi publik, terjadi penurunan yang paling tinggi, mencapai 53% sejak 4 April-16 Mei 2020. Penurunan ini berkurang jika membandingkan pantauan data 26 Juli sampai 6 September 2020 yang menunjukkan penurunan penggunaan transportasi menjadi 35% dari kondisi normal.

**TRANSIT STATIONS**

**-53%**

compared to baseline

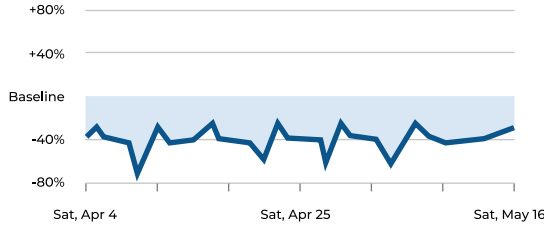


Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus and train stations

**WORKPLACES**

**-22%**

compared to baseline

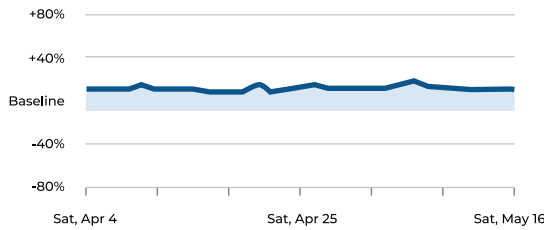


Mobility trends for places of work

**RESIDENTIAL**

**-15%**

compared to baseline



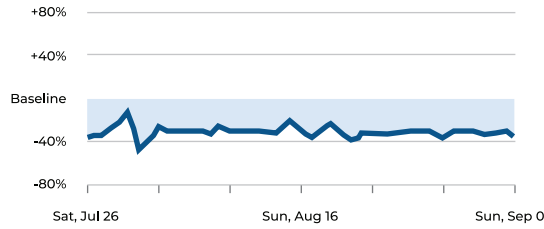
Mobility trends for places of residence

4 April – 16 Mei 2020

**TRANSIT STATIONS**

**-35%**

compared to baseline

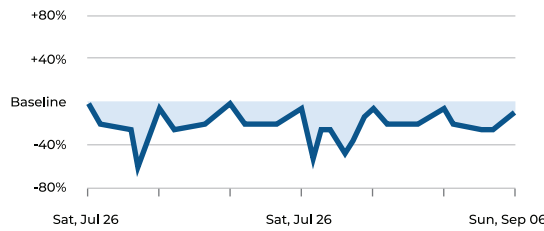


Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus and train stations

**WORKPLACES**

**-6%**

compared to baseline

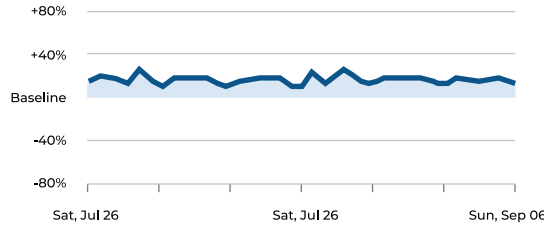


Mobility trends for places of work

**RESIDENTIAL**

**+8%**

compared to baseline



Mobility trends for places of residence

26 Juli – 6 September 2020

## **5. Tempat kerja**

Penurunan mobilitas ke tempat kerja terjadi 22% dari kondisi sebelum pandemi Covid 19. Namun penurunan ini juga berkurang hingga mencapai -6% dari kondisi normal pada Juli – September 2020.

## **6. Tempat tinggal**

Aspek terakhir yang diamati Google adalah pergerakan masyarakat di rumah tinggalnya. Ini adalah satu-satunya aspek yang menunjukkan terjadinya peningkatan. Selama masa pandemi ini, masyarakat terpantau 15% lebih banyak tinggal dan beraktivitas di rumah dibandingkan dengan masa-masa normal sebelum terjadi pandemi Covid-19. Namun kondisi ini berbeda pada pantauan Juli – September yang menunjukkan peningkatannya menurun hingga mencapai 8%.

Pada sisi yang lain, menjadikan rumah sebagai basis seluruh aktivitas tidak sepenuhnya aman. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi menjadi salah satu bukti bahwa meningkatnya aktivitas di rumah juga memperluas potensi adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah. Dengan kata lain perubahan-perubahan yang terjadi saat ini memberikan dampak positif sekaligus juga dampak negatif.

Masa depan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan akan dipengaruhi oleh beberapa skenario yang mungkin terjadi yaitu pemulihan saat dimana Covid-19 dipahami sebagai keadaan darurat dan tindakan luar biasa dapat diterima untuk kembali ke dalam mekanisme pasar. Kedua situasi keruntuhan, dimana Covid-19 gagal diatasi dan menimbulkan konflik sosial yang cepat dan luas. Ketiga adalah situasi transisi dimana Covid-19 dipahami sebagai sebuah gangguan yang dapat menciptakan peluang untuk mendorong perubahan, baik masyarakat yang berkelanjutan maupun masyarakat digital. Dalam situasi ini, produksi dan konsumsi berkelanjutan akan lebih mudah terwujud.

## **Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim**

Meski Covid-19 menjadi ancaman saat ini, namun perubahan iklim masih menjadi ancaman jangka panjang. Menurunnya aktivitas ekonomi menjadikan kondisi lingkungan menjadi lebih baik, seperti menurunnya emisi. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi ukuran yang tepat, pertama situasi perubahan iklim yang terjadi bisa memperparah wabah itu sendiri. Kedua, meskipun terjadi penurunan emisi akibat Covid-19, namun hal tersebut tidak bisa menggantikan upaya-upaya yang telah disepakati dalam TPB maupun Paris Agreement. Penurunan emisi yang terjadi saat ini bersifat jangka pendek.

Saat industri penerbangan, otomotif dan konsumsi listrik mulai kembali normal, peningkatan emisi dapat berlangsung lebih cepat bahkan lebih dibanding situasi sebelum Covid-19. Kontraksi ekonomi yang telah terjadi sejak enam bulan lalu menjadi pemicunya. Menurunnya harga minyak akibat krisis ekonomi, juga akan mengurangi insentif untuk pengembangan energi terbarukan.



## Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Menurunnya aktivitas perekonomian, memberi dampak positif terhadap ekosistem laut. Berkurangnya lalu lintas laut dan wisata laut telah membantu memulihkan kondisi laut termasuk mengurangi emisi karbon.<sup>64</sup> Laut memiliki potensi untuk menyerap CO<sub>2</sub> hingga 30% sehingga berkontribusi besar terhadap pengurangan pemanasan global. Terisolasinya aktivitas manusia akibat virus Corona dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 memberikan waktu bagi lautan untuk bernafas sejenak. Namun pada sisi lain, Covid-19 juga menyebabkan limbah terutama plastik dan sampah medis semakin meningkat.

Covid-19 juga mengakibatkan pendapatan nelayan berkurang.<sup>65</sup> Setidaknya terdapat 2,7 juta nelayan di Indonesia dan 6 juta orang yang bekerja dalam industri perikanan skala kecil. Problem ketidakakuratan data dalam distribusi bantuan sosial, mengakibatkan kelompok nelayan memiliki potensi untuk tidak mendapatkan program bantuan sosial. Namun, pada skala global, pandemi Covid-19 mendorong negara-negara eksportir seperti Indonesia mengalihkan pengirimannya ke pasar AS dan Eropa, pasar terbesar produk udang dan tuna. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor perikanan Indonesia pada Maret 2020 mencapai US \$ 427,71 juta, meningkat 6,34% dibanding Februari 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari-Maret 2020 mencapai US \$ 1,24 miliar, meningkat 9,82 persen dibandingkan periode tahun lalu. Volume ekspor Januari-Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton, meningkat 10,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.<sup>66</sup>

## Tujuan 15. Ekosistem Darat

Asal muasal virus Covid-19 belum dapat diidentifikasi dengan pasti.<sup>67</sup> Namun belajar dari wabah penyakit sebelumnya, banyak wabah yang muncul karena penyebaran lewat hewan kepada manusia. Deforestasi menjadi salah satu pemicunya.

Deforestasi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, yang setengah dari wilayah daratan Indonesia ((94,1 juta ha) merupakan lahan berhutan. Kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun akan merubah ekosistem dan berpotensi meningkatkan risiko penularan virus Covid-19. Berdasar data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa tahun 2020 tidak terjadi El-Nino, namun 30% wilayah di Indonesia akan mengalami hujan di bawah normal, hujan normal 57,6% dan hujan di atas normal 12,3%. Selain faktor alam, deforestasi juga terjadi akibat pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit.

---

<sup>64</sup> Internasional shipping berkontribusi terhadap 2,5% emisi karbon

<sup>65</sup> Lihat <https://www.mongabay.co.id/2020/05/01/begini-kondisi-nyata-nelayan-ntt-di-tengah-pandemi-covid-19/>

<sup>66</sup> <https://en.antaranews.com/news/146213/fisheries-exports-up-amid-covid-19-pandemic-ministry>

<sup>67</sup> Beberapa pihak mengklaim bahwa sumber awal virus Covid-19 berasal dari kelelawar sebelum menular ke manusia <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/dN60rrak-apakah-wabah-covid-19-disebabkan-kelelawar>

## **Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Penanganan pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi kepercayaan antara warga dengan pemerintah dan kepercayaan di antara warga sendiri. Deliveri layanan publik yang efektif, informasi yang cepat dan terpercaya, sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Jika tidak akan mengganggu pelaksanaan dan pencapaian TPB akibat pengalihan sumber daya secara masif untuk merespons krisis. Pelayan publik memiliki peran penting baik dalam penanganan wabah itu sendiri maupun dalam merancang strategi dan berinovasi untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Besarnya dana untuk penanganan Covid-19<sup>68</sup> menjadi tidak bermanfaat jika dialokasikan terlambat dan tidak tepat sasaran. Transparansi, akuntabilitas dan integritas, harus menjadi bagian penting. Kebebasan informasi dan inovasi yang dilakukan oleh warga harus mendapat tempat yang baik untuk mendorong akuntabilitas dan mencari terobosan dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya.<sup>69</sup> Munculnya wabah juga tidak bisa menjadi alasan untuk menutup ruang partisipasi<sup>70</sup> dalam proses pengambilan kebijakan.

Covid-19 juga memperlihatkan urgensi adanya perlindungan data pribadi dalam upaya penanganan dan pemulihan Covid-19. Ini penting untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapat stigma, prasangka negatif maupun perlakuan diskriminatif karena statusnya terkait Covid-19.

Tantangan penegakan Hak Asasi Manusia di masa Covid-19 juga terasa berat karena ada beberapa kebijakan pembatasan mobilitas yang sangat rentan menjadi kebijakan sekuritasi yang kemudian cenderung represif. Dalam hal ini perlu dipastikan semua kebijakan terkait pembatasan mobilitas tetap dalam koridor penghormatan pada hak asasi manusia.

## **Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Covid-19 berdampak kepada pembiayaan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tahun 2019 total pendanaan yang diberikan negara maju melalui Official Development Assistance (ODA) sebesar 147,4 milyar USD. Meski terjadi peningkatan untuk wilayah Afrika dan negara-negara terbelakang, namun secara

---

<sup>68</sup> Total dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang dialokasikan sebesar 695,2 triliun

<sup>69</sup> <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>

<sup>70</sup> Terdapat pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berlangsung saat pandemi dan tidak cukup melibatkan partisipasi publik

total nilainya tidak berubah jauh dari tahun 2018. Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan ODA yang disalurkan. Covid-19 juga mengakibatkan nilai Foreign Direct Investment (FDI) dan remitansi menurun drastis.<sup>71</sup>

Sebagai negara menengah atas Indonesia menghadapi situasi yang lebih rumit untuk mendanai pembangunannya. Stimulus ekonomi diberikan agar sektor bisnis dan warga tidak semakin terdampak. Sementara potensi pendapatan, terutama dari pajak berkurang<sup>72</sup>. Konsekuensinya defisit anggaran meningkat, potensi hutang bertambah<sup>73</sup>, yang pada akhirnya berdampak pada belanja sosial pemerintah. Ruang fiskal bagi pembangunan berkelanjutan semakin terbatas.

Ekspor non-migas juga terus mengalami tekanan akibat Covid-19. BPS mencatat pada periode Januari hingga Juni 2020, ekspor non migas Indonesia sebesar USD 72,43 miliar menurun 3,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2019.<sup>74</sup>

Indonesia harus memaksimalkan posisi strategisnya di ASEAN, OKI, G20 dan forum-forum multilateral PBB lainnya untuk mendorong inisiatif global yang adil dan setara untuk pemulihan dan penanganan Covid-19.

---

<sup>71</sup> Secara global Foreign Direct Investment akan berkurang hingga 40% di tahun 2020, sedangkan remitansi secara global akan turun dari 554 billion USD menjadi 445 billion USD

<sup>72</sup> Dalam situasi normal, Indonesia masih menghadapi tantangan tax ratio yang rendah. Sementara peningkatan tax ratio sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam membiayai pembangunan.

<sup>73</sup> Defisit APBN Indonesia bertambah dari Rp 852,9 triliun menjadi Rp 1.028,5 triliun <https://nasional.kontan.co.id/news/covid-19-bikin-utang-pemerintah-tambah-besar-bagaimana-pelunasannya>. Status Indonesia sebagai negara kelas menengah, menjadikan Indonesia tidak lagi mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah.

<sup>74</sup> [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200715120937.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200715120937.pdf)

## MENGATASI TANTANGAN



Indonesia memiliki modalitas yang baik untuk melaksanakan dan mencapai TPB. Komitmen politik melalui Perpres 59 tahun 2017, terbentuknya Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang multipihak, tersusunnya Peta Jalan TPB dan Rencana Aksi TPB baik di nasional maupun provinsi, menjadi modal besar Indonesia. Keinginan kuat dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan akademisi, untuk terlibat dalam pelaksanaan TPB, juga menjadi tambahan modal Indonesia.

Meski belum dapat dihitung secara pasti, namun krisis kesehatan, sosial dan ekonomi akibat Covid-19 telah memberi isyarat kerentanan yang dihadapi Indonesia. Mulai dari ketidaksiapan menangani krisis hingga kemampuan mengurangi dampak yang muncul.

Dalam kerangka pelaksanaan dan pencapaian TPB, Covid-19 juga menguji sejauh mana pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun telah terlaksana. Langkah-langkah terukur perlu dilakukan agar TPB mampu berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19, sekaligus menjaga agar pelaksanaan TPB di Indonesia tidak jauh tertinggal. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- **Monitoring dan evaluasi.** Penilaian secara menyeluruh tentang dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan TPB di Indonesia. Upaya ini juga untuk melihat kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh sebelum Covid-19 terjadi. Dari sisi proses, monitoring dan evaluasi ini selaras dengan Permen PPN/ Bappenas No.7/2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan TPB, yang memandatkan untuk melakukan pemantauan setiap enam bulan sekali dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun.
- **Revisi Peta Jalan TPB dan dokumen teknis lainnya.** Dokumen Peta Jalan TPB menjadi dokumen utama untuk melihat arah dan target TPB yang ingin dicapai Indonesia. Pandemi-Covid-19 telah merubah asumsi-asumsi makro pembangunan Indonesia dan asumsi-asumsi pada tiap-tiap Tujuan TPB, termasuk skenario pembiayaan. Revisi peta jalan ini kemudian diikuti dengan revisi dokumen-dokumen teknis lainnya yaitu Rencana Aksi baik nasional dan daerah.
- **Memperbaiki sistem dan layanan kesehatan masyarakat.** Belajar dari pengalaman beberapa negara, besarnya dana alokasi kesehatan bukan jaminan kemampuan untuk mengatasi Covid-19. Negara dengan alokasi anggaran kesehatan yang tinggi seperti Inggris dan Amerika Serikat juga kewalahan. Negara seperti Indonesia yang alokasi anggaran kesehatannya masih terbatas

dan masih memiliki tantangan untuk mengatasi berbagai penyakit menular dan tidak menular, menghadapi situasi yang lebih rentan saat pandemi terjadi. Memperbaiki *public health system* harus menjadi prioritas ke depan, mulai dari meningkatkan kapabilitas layanan publik kesehatan hingga menciptakan hubungan sektor publik dan swasta yang mampu memberikan manfaat dari investasi publik dalam pengadaan vaksin maupun distribusinya secara adil dan terjangkau ke seluruh warga.

- **Membangun dan memperkuat akses warga terhadap layanan dasar serta reformasi perlindungan sosial.** Air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan menjadi isu-isu utama TPB yang erat dengan Covid-19. Memastikan ketersediaan akses layanan dasar yang esensial tersebut bukan hanya membantu mencegah penularan, namun juga mendorong tercapainya beberapa Tujuan TPB. Memperbanyak ragam perlindungan sosial juga perlu menjadi prioritas mengingat Covid-19 tidak hanya berdampak pada warga miskin. *Universal Child Benefits (UCBs)*, *Universal Basic Income (UBI)* dapat menjadi tambahan model perlindungan sosial di Indonesia.
- **Mengantisipasi kerentanan.** Pandemi Covid-19 telah memberi bukti bahwa Kelompok warga rentan menghadapi pukulan paling keras. Potensi kerentanan sangat mudah dikenali, namun seringkali terlambat diantisipasi. Belajar dari pandemi Covid-19 dan selaras dengan semangat *Leave No One Behind*, mengembangkan pendekatan yang dapat mengantisipasi kerentanan sangat dibutuhkan untuk lebih memajukan pelaksanaan dan pencapaian TPB di Indonesia.
- **Pembiayaan pembangunan.** Kontraksi ekonomi yang terjadi akan membatasi sumber-sumber pembiayaan TPB. Dalam jangka pendek pembiayaan multilateral dan bilateral serta filantropi menjadi opsi yang perlu dioptimalkan. Dalam jangka menengah *illicit financial flows*, *asset recovery*, peningkatan rasio pajak dan investasi dapat menjadi tambahan opsi pembiayaan. Menyediakan sumber pendanaan untuk *Civil Society Organization (CSO)* melalui anggaran pemerintah juga semakin signifikan untuk dilakukan di masa pandemi ini.
- **Memperkuat kerjasama internasional untuk limpahan potensi dukungan (*spillover*) TPB.** Upaya ini dapat meningkatkan kapasitas Indonesia untuk melaksanakan dan mencapai TPB termasuk mengurangi beban pendanaan TPB. Selain itu juga dapat meningkatkan peran Indonesia dalam membantu negara-negara berkembang lainnya, terutama dalam posisinya sebagai anggota G-20 dan G-77 serta memperkuat pelaksanaan *South-South and Triangular Cooperation (SSTC)* Indonesia.
- **Memperkuat tata kelola TPB dengan meningkatkan kerjasama multipihak.** Keberadaan Tim Koordinasi Nasional TPB yang beranggotakan banyak pihak harus dioptimalkan. Peran sektor swasta, CSO, akademisi dan aktor-aktor pembangunan lainnya, sangat diperlukan terutama untuk merancang prioritas aksi, strategi pelaksanaan dan pembiayaan TPB.

## REFERENSI



Azzahra, Nadia, F., (2020), Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19, Ringkasan Kebijakan No.2, Center for Indonesian Policy Studies, <https://www.cips-indonesia.org/post/mengkaji-hambatan-pembelajaran-jarak-jauhdi-indonesia-di-masa-covid-19>

Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2020, Berita Resmi Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Mei 2020, Berita Resmi Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS), 15 Juli 2020, Berita Resmi Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Agustus 2020, Berita Resmi Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS), (2020), Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19

Ito, A., Evelyn W., and Masumi Oto, (2020), Leaving No Behind: The Covid-19 Crisis Through Disability and Gender Lens, Policy Brief No.69, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)

Kauzya, John-Mary, (2020), Covid-19: Reaffirming State-People Governance Relationships, Policy Brief No.75, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)

Martens, J., Bodo Ellmers, and Vera Pakorny, (2020), Covid-19 and The SDGs The Impact of Corona Virus Pandemic on The Global Sustainability Agenda, Social Watch Ministry of National Development Planning of The Republic of Indonesia, (2019), Voluntary National Review (VNR): Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality

Ministry of National Development Planning of The Republic of Indonesia, (2017), Voluntary National Review (VNR): Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in A Changing World

Ministry of National Development Planning of The Republic of Indonesia, (2019), Roadmap of SDGs Indonesia Towards 2030

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Sumner, A., Chris Hoy, and Eduardo Ortiz Juarez, (2020), Estimates of The Impact of Covid-19 on Global Poverty, WIDER Working Paper 2020/43, United Nations University UNU-WIDER

Suryahadi, A., Ridho A., Daniel S., (2020), The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia, SMERU Working Paper (Draft), SMERU Research Institute.

Sustainable Development Report 2020 The Sustainable Development Goals and Covid-19

United Nations, (2020), A UN Framework for The Immediate Socio-Economic Response to Covid-19, [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un\\_comprehensive\\_response\\_to\\_covid-19\\_june\\_2020.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_comprehensive_response_to_covid-19_june_2020.pdf)

United Nations Development Programme (UNDP), (2020), Addressing The Covid-19 Economic Crisis in Asia Through Social Protection <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/addressing-covid-19-economic-crisis-in-asia-through-social-protection.html>


United Nations Development Programme (UNDP) Regional Bureau for Asia and The Pacific , (2020), The Social Economic Impact of Covid-19 in The Asia Pacific Region, Policy Notes <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/the-social-and-economic-impact-of-covid-19-in-asia-pacific.html>





# Migrant CARE

Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

 Jl. Jatipadang I No. 5A, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

 [migrantcare.net](http://migrantcare.net)

 [secretariat@migrantcare.net](mailto:secretariat@migrantcare.net)

© 2020